Accrual Basis

LAPORAN KEUANGAN

Akhir Tahun

Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2020

Unaudited

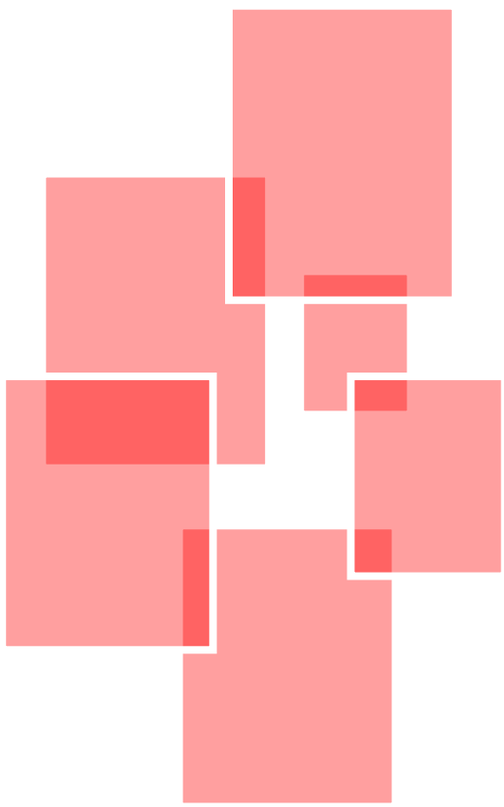

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2020

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang terdiri dari : **Laporan Realisasi Anggaran**; **Neraca**; **Laporan Operasional**; **Laporan Perubahan Ekuitas**; dan **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**.

Laporan KeuanganTahun Anggaran 2020ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan; dan juga mengacu padaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan, kritik, saran, koreksi maupun tanggapan yang sifatnya membangun dari pengguna laporan ini sangat kami harapkan demi perbaikan kedepannya agar selalu dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, Januari 2021

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. Tangkudung, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB iii
RINGKASAN iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN vii
LAPORAN OPERASIONAL viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ix
NERACA x
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 2
BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD 3
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 8
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 8
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 8
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 9
4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 9
4.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 16
4.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 20
4.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 21
4.1.1 Aset 21
4.1.2 Kewajiban 26
4.1.3 Ekuitas 27
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 28
BAB VI PENUTUP 29
LAMPIRAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari : (a) Laporan realisasi anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan operasional; (d) Laporan perubahan ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2021

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. Tangkudung, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

RINGKASAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2020 adalah **NIHIL**. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Provinsi Kalimantan Tengah tidak dibebankan pada target pendapatan.

Sedangkan untuk ***Realisasi Belanja*** sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp 9.524.096.204,00** atau mencapai **88,28%** dari total alokasi anggaran yang disediakan sebesar **Rp 10.788.314.369,05**. Sehingga terdapat sisa dana yang belum terealisasi sebesar **Rp1.264.218.165,05**atau **11,72%.**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2020		Per 31 Desember 2019	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belanja	**10.788.314.369,05**	**9.524.096.204,00**	**18.073.319.486,00**	**16.045.847.019,00**

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 31 Desember 2020 memiliki jumlah **Aset sebesar Rp 4.423.884.929,00** yang terdiri dari Aset Tetap sebesar **Rp 4.381.103.779,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp. 42.781.150,00**. Sedangkan nilai kewajiban sebesar **Rp6.577.287,00**. Sementara itu jumlah ekuitas / kekayaan bersih merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang dimiliki adalah sebesar defisit Rp (4.417.307.642,00).

Ringkasan neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	Kenaikan/ (penurunan)
Aset	**4.423.884.929,00**	**4.402.963.529,00**	**19.921.400,00**
• Aset Lancar	0,00	1.690.600,00	(1.690.600,00)
• Aset Tetap	4.381.103.779,00	4.401.272.929,00	(20.169.150,00)
• Aset Lainnya	42.781.150,00	0,00	42.781.150,00
Kewajiban Jangka Pendek	**6.577.287,00**	**7.660.627,00**	**(1.083.340,00)**
• Utang Beban	6.577.287,00	7.660.627,00	(1.083.340,00)
• Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00	0,00
Ekuitas	**(4.417.307.642,00)**	**(4.395.302.902,00)**	**22.004.740,00**

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah **NIHIL**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp 9.503.091.464,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp (9.503.091.464,00).**

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Periode 31 Desember 2020	Periode 31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL		
• ***Pendapatan – LO***		
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	**0,00**	**0,00**
• **Beban**		
Beban Pegawai – LO	7.899.107.060,00	7.457.380.708,00
Beban Barang dan Jasa	1.603.984.404,00	5.632.612.575,00
Beban Hibah	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	168.624.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	310.000.897,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Beban	**9.503.091.464,00**	**13.568.618.180,00**
Surplus / (Defisit) dari Operasi	**(9.503.091.464,00)**	**(13.568.618.180,00)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00
Surplus / (Defisit) LO	**(9.503.091.464,00)**	**(13.568.618.180,00)**

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 (*Audited*) adalah sebesar Rp4.395.302.902,00 ditambah dengan Defisit-LO sebesar Rp (9.503.091.464,00) didapat nilai Ekuitas sebelum konsolidasi (penggabungan) sebesar Rp (4.395.302.902,00). Setelah konsolidasi nilai ekuitas sebelum penggabungan ditambah dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 1.000.000,00 dan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 9.524.096.204,00 sehingga didapat nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 4.417.307.642,00**.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019
5	**BELANJA**	**10.788.314.369,00**	**9.524.096.204,00**	**88,28 %**	**16.045.847.019,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**10.763.814.369,00**	**9.502.484.204,00**	**88,28 %**	**13.253.846.462,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	9.051.525.580,00	7.899.107.060,00	87,27 %	7.457.380.708,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.712.288.789,00	1.603.377.144,00	93,64 %	5.627.841.754,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0 %	168.624.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**24.500.000,00**	**21.612.000,00**	**88,21 %**	**2.792.000.557,00**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	21.612.000,00	88,21 %	936.672.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0 %	1.855.328.557,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0 %	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		**(10.788.314.369,05)**	**(9.524.096.204,00)**	**88,28 %**	**(13.447.870.455,00)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		**(10.788.314.369,05)**	**(9.524.096.204,00)**	**88,28 %**	**(13.447.870.455,00)**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

KODE	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	**PENDAPATAN - LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**BEBAN**	**9.503.091.464,00**	**13.568.618.180,00**	**(4.065.526.716,00)**	**(29,96)**
9.1.1	Beban Pegawai - LO	7.899.107.060,00	7.457.380.708,00	441.726.352,00	5,92
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.603.984.404,00	5.632.612.575,00	(4.035.205.458,00)	(71,64)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	168.624.000,00		
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	310.000.897,00		
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.7	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**(9.503.091.464,00)**	**(13.568.618.180,00)**	**4.065.526.716,00**	**(29,96)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**(9.503.091.464,00)**	**(13.568.618.180,00)**	**4.065.526.716,00**	**(29,96)**
POS LUAR BIASA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(9.503.091.464,00)**	**(13.568.618.180,00)**	**4.065.526.716,00**	**(29,96)**

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	4.395.302.902,00	1.918.074.068,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.503.091.464,00)	(13.568.618.180,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	1.000.000,00	(5,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.524.096.204,00	16.045.847.019,00
EKUITAS AKHIR	**4.417.307.642,00**	**4.395.302.902,00**

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	1.690.600,00
JUMLAH ASET LANCAR	**0,00**	**1.690.600,00**
ASET TETAP		
Tanah	1.404.000.000,00	1.404.000.000,00
Peralatan dan Mesin	2.480.737.863,00	2.500.907.013,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.855.328.557,00	1.855.328.557,00
Akumulasi Penyusutan	(1.358.962.641,00)	(1.358.962.641,00)
JUMLAH ASET TETAP	**4.381.103.779,00**	**4.401.272.929,00**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	42.781.150,00	0,00
Tagihan TGR	0,00	0,00
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	**42.781.150,00**	**0,00**
JUMLAH ASET	**4.423.884.929,00**	**4.402.963.529,00**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	6.577.287,00	7.660.627,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**6.577.287,00**	**7.660.627,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**6.577.287,00**	**7.660.627,00**
EKUITAS		
EKUITAS	4.417.307.642,00	4.395.302.902,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**4.423.884.929,00**	**4.402.963.529,00**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LANDASAN HUKUM

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85)
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 55);
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/616/DPA-SKPD/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dan Mendahului Perubahan Tahap III Nomor: 188.44/318/DPA-SKPD/2020 tanggal 20 Juli 2020.

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Landasan Hukum
1.2. Sistematika Penulisan
BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
4.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
4.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
4.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
4.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
5.4.1. Aset
5.4.2. Kewajiban
5.4.3. Ekuitas
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VI PENUTUP

BAB II
PENCAPAIANTARGET KINERJA SKPD

Dalam penyusunan APBD Tahun 2020 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

2. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi.
b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

3. Keadilan Anggaran

Pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidak adilan.

4. Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas - Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada Pasal 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai *Tugas*yaitu membantu Gubernur dalam

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan *Fungsi*:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan;
e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
g. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
h. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
i. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
j. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
k. Pengelolaan kesekretariatan Badan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Pada Tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 12 (dua belas) program yang terdiri dari 66(enam puluh enam) kegiatandengan total anggaran sebesar Rp 2.879.208.789,05 sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
BELANJA TIDAK LANGSUNG		**7.909.105.580,00**	**6.781.556.560,00**	**85,74**	**1.127.549.020,00**
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.277.105.580,00	3.592.776.560,00	84,00	684.329.020,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.632.000.000,00	3.188.780.000,00	87,80	443.220.000,00
BELANJA LANGSUNG		**2.879.208.789,05**	**2.742.539.644,00**	**95,25**	**136.669.145,05**
2.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.707.213.815,05**	**1.637.342.134,00**	**95,91**	**69.871.681,05**
2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.005.000,00	4.005.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	103.660.627,00	84.165.197,00	**81,19**	19.495.430,00
2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103.406.800,00	89.136.368,00	**86,20**	14.270.432,00
2.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	220.500.800,00	205.673.250,00	**93,28**	14.827.550,00
2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44.780.000,00	44.391.000,00	**99,13**	389.000,00
2.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	11.997.000,00	**99,98**	3.000,00
2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	71.114.500,00	71.105.900,00	**99,99**	8.600,00
2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	24.500.000,00	21.612.000,00	**88,21**	2.888.000,00
2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.762.000,00	21.674.000,00	**99,60**	88.000,00
2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	29.877.000,00	**99,59**	123.000,00
2.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	109.444.259,05	107.193.419,00	**97,94**	2.250.840,05
2.02.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	212.866.629,00	212.866.000,00	**100,00**	629,00
2.02.01.01.70	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	704.173.200,00	688.646.000,00	**97,79**	15.527.200,00
2.02.01.02	**Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**100,00**	0,00
2.02.01.02.10	Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.02.194	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	5.000.000,00	5.000.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**75.841.000,00**	**71.006.195,00**	**93,63**	**4.834.805,00**
2.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	2.600.000,00	2.600.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.05.36	Rapat koordinasi perencanaan	69.491.000,00	64.656.195,00	**93,04**	4.834.805,00
2.02.01.05.149	Penigkatan Kapasitas Sistem Perencanaan	3.750.000,00	3.750.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**129.774.400,00**	**127.927.500,00**	**98,58**	**1.846.900,00**
2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.904.000,00	6.875.600,00	**99,59**	28.400,00
2.02.01.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	39.000.000,00	39.000.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.500.000,00	8.475.500,00	**99,71**	24.500,00
2.02.01.06.06	Penyusunan RKA-SKPD	18.150.000,00	16.460.000,00	**90,69**	1.690.000,00
2.02.01.06.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.06.15	Penyusunan renja SKPD	16.466.500,00	16.466.500,00	**100,00**	0,00
2.02.01.06.55	Penyusunan Renstra SKPD	10.400.000,00	10.296.000,00	**99,00**	104.000,00
2.02.01.06.63	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	30.353.900,00	30.353.900,00	**100,00**	0,00
2.02.01.08	**Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah**	**17.600.000,00**	**16.352.000,00**	**92,91**	**1.248.000,00**
2.02.01.08.01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	17.600.000,00	16.352.000,00	**92,91**	1.248.000,00
2.02.01.15	**Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan**	**406.888.164,00**	**355.949.340,00**	**87,48**	**50.938.824,00**
2.02.01.15.05	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	34.800.000,00	31.900.000,00	**91,67**	2.900.000,00
2.02.01.15.10	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tk. Provinsi	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.15.20	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tk. Provinsi	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.15.24	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	75.000.000,00	66.349.600,00	**88,47**	8.650.400,00

2.02.01.15.25	Rakornas Forum Anak Nasional	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.15.29	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.15.30	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi,Kabupaten dan Kota	50.923.764,00	50.923.764,00	**100,00**	0,00
2.02.01.15.31	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.15.40	Monev PUG di Daerah	1.429.000,00	1.429.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.15.44	Rapat Forum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.15.45	Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA Prov. Kalteng	170.000.000,00	130.611.576,00	**76,83**	39.388.424,00
2.02.01.15.46	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	74.735.400,00	74.735.400,00	**100,00**	0,00
2.02.01.16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	**52.793.700,00**	**47.534.500,00**	**90,04**	**5.259.200,00**
2.02.01.16.33	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	52.793.700,00	47.534.500,00	**90,04**	5.259.200,00
2.02.01.16.42	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	**84.424.710,00**	**84.318.180,00**	**99,87**	**106.530,00**
2.02.01.17.26	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	78.187.210,00	78.080.680,00	**99,86**	106.530,00
2.02.01.17.42	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	6.237.500,00	6.237.500,00	**100,00**	0,00
2.02.01.17.43	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.18	**Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan**	**162.241.400,00**	**160.737.600,00**	**99,07**	**1.503.800,00**
2.02.01.18.07	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	72.717.600,00	72.717.600,00	**100,00**	0,00
2.02.01.18.25	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	75.000.000,00	73.500.000,00	**98,00**	1.500.000,00
2.02.01.18.26	Capacity Building Bagi Perempuan	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.18.27	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	14.523.800,00	14.520.000,00	**99,97**	3.800,00
2.02.01.20	**Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**	**48.910.100,00**	**48.910.100,00**	**100,00**	**0,00**
2.02.01.20.23	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	30.510.100,00	30.510.100,00	**100,00**	0,00
2.02.01.20.24	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	18.400.000,00	18.400.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.20.26	Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.21	**Program Penyusunan Profil Lembaga**	**55.650.000,00**	**55.650.000,00**	**100,00**	**0,00**
2.02.01.21.09	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	37.200.000,00	37.200.000,00	**100,00**	0,00
2.02.01.21.10	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.21.12	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.02.01.21.22	Pengembangan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	18.450.000,00	18.450.000,00	**100,00**	0,00
2.08.01.15	**Program Keluarga Berencana**	**97.871.500,00**	**96.812.095,00**	**98,92**	**1.059.405,00**
2.08.01.15.02	Pelayanan KIE	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.08.01.15.25	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	63.449.500,00	63.449.500,00	**100,00**	0,00
2.08.01.15.29	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	19.599.100,00	18.589.695,00	**94,85**	1.009.405,00
2.08.01.15.34	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	14.822.900,00	14.772.900,00	**99,66**	50.000,00
2.08.01.15.35	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.08.01.15.50	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan Momentum Keluarga Berencana	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2.08.01.15.53	Peningkatan Kapasitas Bina Ketahanan Remaja Dalam Kesehatan Reproduksi Remaja	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.

Pendapatan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	**7.909.105.580,00**	**6.781.556.560,00**	**85,74**
Belanja Langsung	**2.879.208.789,05**	**2.742.539.644,00**	**95,25**
Total	**10.788.314.369,05**	**9.524.096.204,00**	**88,28**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan.

B. Belanja

Sampai dengan periode 31 Desember 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat merealisasikan Belanja Daerah sebesar **Rp 9.524.096.204,00** atau **88,28%** dari total Pagu Anggaran yang disediakan **Rp 10.788.314.369,05** dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

▪ Belanja Pegawai	Rp	7.899.107.060,00
▪ Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.603.377.144,00
▪ Belanja Bantuan Sosial	Rp	0,00
▪ Belanja Modal	Rp	21.612.000,00

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

-

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :**NIHIL**

4.1.2. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi terdiri atas :

A. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar **Rp 9.051.525.580,00** atau **83,90%** dari Total Anggaran SKPD. Sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar **Rp 7.899.107.060,00** atau **87,27%** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 1.152.418.520,00 (12,73%).** Sedangkan realisasi 31 Desember 2019 sebesar Rp 7.457.380.708,00.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
Gaji dan Tunjangan PNS	**4.277.105.580,00**	**3.592.776.560,00**	**84,00**	**3.502.788.731,00**
- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.365.208.000,00	2.882.520.900,00	85,66	2.813.576.347,00
- Tunjangan Keluarga	301.112.000,00	195.494.646,00	64,92	212.792.000,00
- Tunjangan Jabatan	331.915.500,00	307.250.000,00	92,57	248.615.000,00
- Tunjangan Fungsional	33.937.750,00	17.150.000,00	50,53	26.030.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum	73.974.250,00	59.970.000,00	81,07	69.440.000,00
- Tunjangan Beras	133.614.900,00	109.499.040,00	81,95	112.902.780,00
- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	37.170.540,00	20.856.723,00	56,11	19.394.027,00
- Pembulatan Gaji	172.640,00	35.251,00	20,42	38.577,00
- Iuran Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKK)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan PNS	**3.632.000.000,00**	**3.188.780.000,00**	**87,80**	**2.492.115.000,00**
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.857.000.000,00	2.564.930.000,00	89,78	1.928.960.000,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
- Tunjangan Uang Makan	775.000.000,00	623.850.000,00	80,50	518.155.000,00
Honorarium PNS	**422.270.000,00**	**406.942.500,00**	**96,37**	**524.394.000,00**
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	223.450.000,00	214.150.000,00	95,84	302.364.000,00
- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.000.000,00	3.500.000,00	50,00	33.000.000,00
- Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	14.700.000,00
- Honorarium Pengelola Uang dan Barang	191.820.000,00	189.292.500,00	98,68	174.330.000,00
Honorarium Non PNS	**720.150.000,00**	**710.608.000,00**	**98,67**	**931.082.977,00**
- Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	0,00	0,00	0,00	39.800.000,00
- Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap	720.150.000,00	710.608.000,00	98,67	891.282.977,00
Honorarium Non Pegawai	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
- Moderator	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Belanja Pegawai	**9.051.525.580,00**	**7.899.107.060,00**	**87,27**	**7.457.380.708,00**

B. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar **Rp 1.712.288.789,00** atau **15,87%** dari Total Anggaran SKPD. Sampai dengan 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar **Rp 1.603.377.144,00** atau **93,64%,** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 108.911.645,05 (6,36%).** Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 5.627.841.754,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Bahan Pakai Habis	301.754.310,00	295.394.400,00	97,89	468.348.200,00
- Belanja bahan/material	19.066.100,00	18.998.000,00	99,64	0,00
- Belanja Jasa Kantor	291.625.527,00	256.456.982,00	87,94	540.545.740,00
-Belanja Premi Asuransi	29.173.200,00	23.188.000,00	79,48	0,00
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	131.356.800,00	97.465.334,00	74,20	109.131.059,00
- Belanja Cetak dan Penggandaan	96.465.550,00	90.843.000,00	94,17	231.328.200,00
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	43.000.000,00	39.950.000,00	92,91	160.390.000,00
- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	4.000.000,00	33,33	5.750.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman	86.607.500,00	86.492.500,00	99,87	405.797.500,00
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	69.498.000,00
- Belanja Pakaian Kerja	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	6.500.000,00
- Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	89.960.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas	678.489.802,05	667.838.928,00	98,43	3.498.773.555,00
- Belanja Pemeliharaan	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	41.819.500,00
Jumlah	**1.712.288.789,05**	**1.603.377.144,00**	**93,64**	**5.627.841.754,00**

1. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (5 . 2 . 2 . 01 .)

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor dianggarkan sebesar **Rp 301.754.310,00**, sampai dengan periode 31 Desember 2020telah terealisasikan sebesar **Rp 295.394.400,00** atau **97,89%.** Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 468.348.200,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja alat tulis kantor	124.434.510,00	123.912.400,00	99,58	200.797.000,00
- Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	16.002.800,00
- Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	5.784.000,00	5.784.000,00	100,00	13.401.000,00
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	41.113.000,00	39.233.000,00	95,43	19.502.400,00
- Belanja Dokumentasi	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	25.970.000,00
- Belanja Bahan Dekorasi	76.250.000,00	76.100.000,00	99,80	147.605.000,00
- Belanja Bahan Makanan/Minuman serta Barang lainnya	2.729.000,00	2.725.000,00	99,85	0,00
- Belanja Baliho	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
- Belanja Bahan Diklat	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00
- Belanja Bahan Praktik Ketrampilan	13.883.800,00	13.880.000,00	99,97	24.070.000,00
- Belanja Cinderamata	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	20.010.000,00	16.210.000,00	81,01	7.000.000,00
Jumlah	**301.754.310,00**	**295.394.400,00**	**97,89**	**468.348.200,00**

2. *Belanja Bahan/Material (5 . 2 . 2 . 02 .)*

Belanja Bahan/Material dianggarkan sebesar **Rp 19.066.100,00,** sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar **Rp 18.998.000,00** atau **99,64%.** Sedangkan pada Tahun 2019 tidak dianggarkan.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Bahan Baku Bangunan	650.000,00	590.000,00	90,77	0,00
- Belanja Bahan Baku Obat- Obatan	5.836.100,00	5.836.000,00	100,00	0,00
- Belanja Persediaan Makanan Pokok	6.080.000,00	6.072.000,00	99,87	0,00
- Belanja Bahan Perlengkapan Labolatorium	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**19.066.100,00**	**18.998.000,00**	**99,64**	0,00

3. *Belanja Jasa Kantor (5 . 2 . 2 . 03 .)*

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar **Rp 291.625.527,00,** sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar **Rp 256.456.982,00** atau **87,94%.** Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 540.545.740,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja telepon	38.272.210,00	28.843.508,00	75,36	30.942.027,00
- Belanja listrik	71.238.417,00	57.006.679,00	80,02	49.149.213,00
- Belanja surat kabar/majalah	22.623.000,00	22.545.000,00	99,66	47.720.000,00
- Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	0,00	0,00	6.125.000,00
- Belanja paket/pengiriman	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
- Belanja Jasa Service Peralatan / Perlengkapan Kantor	11.673.000,00	11.670.000,00	99,97	21.575.000,00
- Belanja Jasa Penyiaran melalui Media Cetak Massa	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	48.800.000,00
- Belanja Jasa Iklan	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	61.190.000,00	59.150.000,00	96,67	183.400.000,00
- Uang Hadiah Lomba/Prestasi untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
- Belanja Jasa Pembaca Doa	400.000,00	400.000,00	100,00	5.450.000,00
- Belanja Jasa Pihak Ketiga	78.528.900,00	69.141.795,00	72,59	121.584.500,00
- Belanja Jasa Pemandu Lagu / Dirigen	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Jumlah	**291.625.527,00**	**256.456.982,00**	**87,94**	**540.545.740,00**

4. *Belanja Premi Asuransi (5 . 2 . 2 . 04 .)*

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar **Rp 29.173.200,00,** sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar **Rp 23.188.000,00** atau 79,84%. Sedangkan pada Tahun 2019 tidak dianggarkan.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan	29.173.200,00	23.188.000,00	79,48	0,00
Jumlah	**29.173.200,00**	**23.188.000,00**	**79,48**	**0,00**

5. *Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (5 . 2 . 2 . 05 .)*

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar **Rp 131.356.800,00,** sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar **Rp 97.465.334,00** atau **74,20%.** Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 109.131.059,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Per 31 Desember 2019
- Belanja Jasa Service	34.600.550,00	23.085.254,00	66,72	28.091.289,00
- Belanja Penggantian Suku Cadang	28.966.250,00	24.290.200,00	83,86	34.266.000,00
- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan pelumas	45.590.000,00	41.997.580,00	92,12	40.372.470,00
- Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	22.200.000,00	8.092.300,00	36,45	6.401.300,00
Jumlah	**131.356.800,00**	**97.465.334,00**	**74,20**	**109.131.059,00**

6. *Belanja Cetak dan Penggandaan (5 . 2 . 2 . 06 .)*

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar **Rp 96.465.550,00,** sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar **Rp 90.843.000,00** atau **94,17%.** Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp231.328.200,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Per 31 Desember 2019
- Belanja cetak	23.948.500,00	23.948.500,00	100,00	91.503.500,00
- Belanja Penggandaan	67.776.050,00	63.843.500,00	94,20	129.476.700,00
- Belanja penjilidan	4.741.000,00	3.051.000,00	64,35	10.348.000,00
Jumlah	**96.465.550,00**	**90.843.000,00**	**94,17**	**231.328.200,00**

7. *Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir (5 . 2 . 2 . 07 .)*

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan sebesar **Rp 43.000.000,00**,sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar **Rp 39.950.000,00** atau **92,91%,** sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 160.390.000,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Per 31 Desember 2019
- Belanja sewa gedung/ kantor / tempat	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	116.090.000,00
- Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	15.500.000,00	12.450.000,00	80,32	44.300.000,00
Jumlah	**43.000.000,00**	**39.950.000,00**	**92,91**	**160.390.000,00**

8. *Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (5 . 2 . 2 . 10 .)*

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dianggarkan sebesar **Rp 12.000.000,00** sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar **Rp 4.000.000,00** atau **33,33%.** Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.750.000,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja sewa meja kursi	300.000,00	300.000,00	100,00	1.500.000,00
- Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja sewa pakaian adat / tradisional	700.000,00	700.000,00	100,00	750.000,00
- Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.500.000,00
Jumlah	**12.000.000,00**	**4.000.000,00**	**33,33**	**5.750.000,00**

9. Belanja Makanan dan Minuman (5 . 2 . 2 . 11 .)

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar **Rp 86.607.500,00,** sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasikan sebesar **Rp 86.492.500,00** atau **99,87%.** Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 405.797.500,00

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	960.000,00	960.000,00	100,00	4.710.000,00
- Belanja makanan dan minuman rapat	28.217.500,00	28.217.500,00	100,00	114.975.000,00
- Belanja makanan dan minuman tamu	44.300.000,00	44.270.000,00	99,93	237.670.000,00
- Biaya Makan dan Minum Pelatihan	13.130.000,00	13.045.000,00	99,35	48.442.500,00
Jumlah	**86.607.500,00**	**86.492.500,00**	**99,87**	**405.797.500,00**

10. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut(5 . 2 . 2 . 12 .)

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut pada tahun 2020 adalah **Tidak Dianggarkan**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 69.498.000,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Anggaran
	Anggaran	Realisasi		
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	69.498.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.498.000,00**

11. Belanja Pakaian Kerja (5 . 2 . 2 . 13 .)

Belanja Pakaian Kerja dianggarkan sebesar **Rp 3.150.000,00** sampai dengan periode 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar **Rp 3.150.000,00** atau **100%**, sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Sedangkan realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp 6.500.000,00.

Uraian	Per 31 Desember 2019			Realisasi Per 31 Desember 2018
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00	6.500.000,00
Jumlah	**3.150.000,00**	**3.150.000,00**	**100,00**	**6.500.000,00**

12. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu (5 . 2 . 2 . 14 .)

Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu dianggarkan sebesar **Rp9.800.000,00,** sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar **Rp 9.800.000,00** atau **100%**.Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 adalah Rp 89.960.000,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi Per 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja pakaian batik tradisional	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	20.300.000,00
- Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	69.660.000,00
Jumlah	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**100,00**	**89.960.000,00**

13. Belanja Perjalanan Dinas (5 . 2 . 2 . 15 .)

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar **Rp 678.489.802,05**, sampai dengan periode 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar **Rp 667.838.928,00** atau **98,43%.** Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.498.773.555,00.

Uraian	Per 31 Desember 2019			Realisasi Per 31 Desember 2018
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah	447.996.629,00	441.266.000,00	98,50	2.056.630.994,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah	230.493.173,05	226.572.928,00	98,30	1.442.142.561,00
Jumlah	**678.489.802,05**	**667.838.928,00**	**98,43**	**3.498.773.555,00**

14. Belanja Pemeliharaan (5 . 2 . 2 . 20 .)

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar **Rp 9.800.000,00** sampai dengan periode 31 Desember 2020telah terealisasi sebesar **Rp 9.800.000,00 (100,00%)**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2019 adalah Rp 41.819.500,00.

Uraian	Per 31 Desember 2019			Realisasi Per 31 Desember 2018
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00	41.819.500,00
Jumlah	**9.800.000,00**	**9.800.000,00**	**100,00**	**41.819.500,00**

C. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2020 adalah **Tidak Dianggarkan**. Sedangkan pada Tahun 2019 telah terealisasi sebesar **Rp 168.624.000,00.**

Uraian	Per 31 Desember 2019			Realisasi Per 31 Desember 2018
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	168.624.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.624.000,00**

4.1.3. BELANJA MODAL

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal sebesar **Rp 24.500.000,00** sampai dengan periode 31 Desember 2020telah -

terealisasi sebesar **Rp. 21.612.000,00 (88,21%)**. Sedangkan belanja modal per 31 Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp 2.792.000.557,00.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Per 31 Desember 2019
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	21.612.000,00	88,21	936.672.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.855.328.557,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**24.500.000,00**	**21.612.000,00**	**88,21**	**2.792.000.557,00**

1. Belanja Modal Tanah

Pada tahun 2020 dan 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah **Tidak Menganggarkan** untuk Belanja Modal Tanah.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesindianggarkan sebesar **Rp 24.500.000,00,** Sampai dengan periode 31 Desember 2020 Belanja Modal Peralatan dan Mesin telah terealisasi sebesar **Rp 21.612.000,00** (88,21%). Sedangkan pada tahun 2019 (per 31 Desember 2019) realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp 936.672.000,00

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2020			RealisasiPer 31 Desember 2019
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	438.590.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	45.246.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	89.575.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	104.050.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	6.810.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	20.416.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	0,00	0,00	105.225.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.000.000,00	17.112.000,00	85,56	22.875.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	6.650.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	86.225.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	5.260.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
Jumlah	**24.500.000,00**	**21.612.000,00**	**88,21**	**936.672.000,00**

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2020 adalah **Tidak Dianggarkan**. Sedangkan pada Tahun 2019(per 31 Desember 2019) telah terealisasi sebesar Rp 1.855.328.557,00.Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2020			Realisasi
	Anggaran	Realisasi	%	Per 31 Desember 2019
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	1.855.328.557,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.855.328.557,00**

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2020 dan 2019**Tidak Menganggarkan.**

5. Belanja Modal Aset tetap Lainnya

Pada tahun 2020 dan 2019**Tidak Menganggarkan.**

4.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.2.1. PENDAPATAN

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah **NIHIL**.

Uraian	Per 31 Desember 2020			Pendapatan Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Pendapatan LRA (Rp)	Pendapatan LO (Rp)	Selisih (Rp)	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0
Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**

4.2.2. BEBAN

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan dan tambahan penghasilan bagi pegawai pemerintahyang berstatus PNS.

Jumlah beban pegawai s/d periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.899.107.060,00. Sedangkan untuk tahun 2019 (per 31 Desember 2019) sebesar Rp 7.457.380.708,00.

No	Uraian	Per 31 Desember 2020			Beban Per 31 Des 2019
		Belanja (Rp)	Beban (Rp)	Selisih (Rp)	(Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	3.592.776.560,00	3.592.776.560,00	0,00	3.502.788.731,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	2.564.930.000,00	2.564.930.000,00	0,00	1.928.960.000,00
3	Tunjangan Kelangkaan Profesi	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
4	Tambahan Penghasilan Uang Makan	623.850.000,00	623.850.000,00	0,00	518.155.000,00
5	Honorarium PNS	406.942.500,00	406.942.500,00	0,00	524.394.000,00
6	Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
7	Honorarium Non PNS	710.608.000,00	710.608.000,00	0,00	931.082.977,00
	Jumlah	**7.899.107.060,00**	**7.899.107.060,00**	**0,00**	**7.457.380.708,00**

Berdasarkan data diatas, jelaskan bahwa sampai dengan periode 31 Desember 2020 tidak ada selisih antara beban pegawai dan realisasi belanja pegawai.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah beban barang dan jasa periode 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp 1.603.984.404,00**sedangkan untuk tahun 2019 (per 31 Desember 2019) adalah sebesar Rp 5.632.612.575,00. Rincian beban barang dan jasa s.d periode 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 (per 31 Desember 2019) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	BELANJA	BEBAN	SELISIH	PER 31 DES 2019
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	123.912.400,00	125.603.000,00	1.690.600,00	200.103.600,00
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	16.002.800,00
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.784.000,00	5.784.000,00	0,00	13.401.000,00
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	39.233.000,00	39.233.000,00	0,00	19.502.400,00
5	Beban Dokumentasi	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	25.970.000,00

6	Beban Bahan Dekorasi	76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	147.605.000,00
7	Beban Baliho	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
8	Beban Bahan Makanan/Minuman serta Barang Lainnya	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00
9	Beban Bahan Diklat	3.750.000	3.750.000	0,00	0,00
10	Beban Bahan Praktik Ketrampilan	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	24.070.000,00
11	Beban Bahan Habis Pakai Lainnya	16.210.000,00	16.210.000,00	0,00	7.000.000,00
12	Beban Bahan Baku Bangunan	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
13	Beban Bahan Obat - Obatan	5.836.000,00	5.836.000,00	0,00	0,00
14	Beban Persediaan Makanan Pokok	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00
15	Beban Bahan Perlengkapan Laboratorium	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
16	Beban Jasa telepon	28.843.508,00	28.490.008,00	-2.422.210,00	31.960.027,00
17	Beban Jasa listrik	57.006.679,00	56.276.839,00	-5.238.417,00	53.595.434,00
18	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	22.545.000,00	22.545.000,00	0,00	47.720.000,00
19	Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	11.670.000,00	11.670.000,00	0,00	21.575.000,00
20	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.150.000,00	59.150.000,00	0,00	183.400.000,00
21	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	0,00	0,00	0,00	6.125.000,00
22	Beban Jasa Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	Beban Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	48.800.000,00
24	Beban Jasa Pembaca Doa	400.000,00	400.000,00	0,00	5.450.000,00
25	Beban Jasa Pihak Ketiga	69.141.795,00	69.141.795,00	0,00	121.584.500,00
26	Beban Premi Asuransi Kesehatan	23.188.000,00	23.188.000,00	0,00	
27	Beban Jasa Service	23.085.254,00	23.085.254,00	0,00	28.091.289,00
28	Beban Penggantian Suku Cadang	24.290.200,00	24.290.200,00	0,00	34.266.000,00
29	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	41.997.580,00	41.997.580,00	0,00	40.372.470,00
30	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	8.092.300,00	8.092.300,00	0,00	6.401.300,00
31	Beban Cetak	23.948.500,00	23.948.500,00	0,00	91.503.500,00
32	Beban Penggandaan	63.843.500,00	63.843.500,00	0,00	129.476.700,00
33	Beban Penjilidan	3.051.000,00	3.051.000,00	0,00	10.348.000,00
34	Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	116.090.000,00
35	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	44.300.000,00
36	Beban Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	1.500.000,00
37	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	700.000,00	700.000,00	0,00	750.000,00
38	Beban Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00
39	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	960.000,00	960.000,00	0,00	4.710.000,00
40	Beban Makanan dan Minuman Rapat	28.217.500,00	28.217.500,00	0,00	114.975.000,00
41	Beban Makanan dan Minuman Tamu	44.270.000,00	44.270.000,00	0,00	237.670.000,00
42	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	13.045.000,00	13.045.000,00	0,00	48.442.500,00
43	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	69.498.000,00
44	Beban Pakaian kerja lapangan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	6.500.000,00
45	Beban Pakaian Batik	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	20.300.000,00

	Tradisional				
46	Beban Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	69.660.000,00
47	Beban Uang Hadiah Lomba/Prestasi untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
48	Beban Jasa Pemandu Lagu/Dirigen	0,00	0,00	0,00	400.000,00
49	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	441.266.000,00	441.266.000,00	0,00	2.056.630.994,00
50	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	226.572.928,00	226.572.928,00	0,00	1.442.142.561,00
51	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	41.819.500,00
	JUMLAH	1.603.377.144,00	1.603.984.404,00	(607.260,00)	5.632.612.575,00

Jika dibandingkan antara beban dengan realisasi belanja, terdapat selisih sebesar **Rp 607.260,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Selisih	Beban Tahun 2020 (per 31 Desember 2020)		
		Persediaan Thn 2020 (Saldo Awal 1 Jan 2020)	Utang Beban Thn 2019	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5=3+4*
1	Beban Alat Tulis Kantor	1.690.600,00	0,00	1.690.600,00
2	Beban Telepon	(2.068.710,00)	(2.422.210,00)	(353.500,00)
3	Beban Listrik	(4.508.577,00)	(5.238.417,00)	(729.840,00)
	Jumlah	**(4.886.687,00)**	**(7.660.627,00)**	**(607.260,00)**

c. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan konsumsi atas barang dan/atau yang diserahkan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah beban bantuan sosial periode 31 Desember2020 adalah **NIHIL**, sedangkan untuk tahun 2019 (per 31 Desember 2019) adalah Rp 168.624.000,00.

Rincian beban bantuan sosial s.d periode 31 Desember 2019 dan Tahun 2018 (per 31 Desember 2018) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2020			Per 31 Desember 2019 (Rp)
		Belanja (Rp)	Beban (Rp)	Selisih (Rp)	
1	Beban Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	168.624.000,00

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap adalah pengurangan nilai pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu nilai asset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada periode berjalan.

Sampai dengan semester 2 Tahun 2020 (per 31 Desember2020) beban penyusutan aset tetap yang dimiliki entitas adalah **NIHIL**, sedangkan pada tahun 2019 (per 31 Desember2019) beban penyusutan senilai Rp 310.000.897,00,00.

No	Uraian	31/12/2020 (Rp)	31/12/2019 (Rp)
	Peralatan dan Mesin		
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	169.472.382,00
2	Beban Penyusutan Alat Kantor	0,00	28.039.008,00
3	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	0,00	35.373.398,00
4	Beban Penyusutan Komputer	0,00	37.795.712,00
5	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	21.465.151,00
6	Beban Penyusutan Alat Studio	0,00	13.334.793,00
7	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	0,00	4.357.953,00
8	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	0,00	162.500,00
9	Beban Penyusutan Barang Dihapuskan	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan	**0,00**	**310.000.897,00**

a. Beban Lain-lain

Beban lain-lain pada tahun 2020 dan tahun 2019 adalah **NIHIL**.

4.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL NIHIL

4.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.3.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan Tahun 2019 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp 4.395.302.902,00** dan Rp 1.918.074.068,00.

4.3.2. SURPLUS (Defisit) LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp (9.503.091.464,00)**. Sedangkan per 31 Desember2019 Defisit-LO sebesar Rp (13.568.618.180,00).

4.3.3. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya s/d periode 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp 1.000.000,00**. Sedangkan pada Tahun 2019 (periode 31 Desember2019) terdapat koreksi akumulasi penyusutan aset senilai (Rp5,00).

4.3.4. KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan s/d periode 31 Desember 2020 adalah Rp 9.524.096.204,00 nilai tersebut diperoleh dari realisasi SP2D yang diterima entitas sebesar Rp 9.604.925.566,00 dikurangi setoran sisa UP sebesar Rp 80.829.362,00. Sedangkan pada Tahun 2019 (s/d periode 31 Desember 2019) kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp 16.045.847.019,00.

4.3.5. NILAI EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 (periode 31 Desember 2019) adalah masing-masing sebesar **Rp 4.417.307.642,00** dan Rp 4.395.302.902,00 **.**

4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

4.4.1. ASET

Aset terdiri atas :

A. Aset Lancar

1. **Kas Bendahara Penerimaan Rp 0,00**

   Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 adalah **NIHIL**.

2. **Kas Bendahara Pengeluaran Rp 0,00**

   Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 adalah **NIHIL.**

3. **Piutang Rp 0,00**

   Nilai Piutang sampai dengan periode 31 Desember 2020 adalah **NIHIL**.

4. **Beban Dibayar Dimuka Rp 0,00**

   Nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 adalah **NIHIL**.

5. **Persediaan Rp 0,00**

   Saldo Persediaan Barang Pakai Habis sebagaimana BA Persediaan Stock Opname Barang Pakai Habis per 31 Desember 2020 adalah **NIHIL.** Sedangkan Persediaan tahun 2019 Saldo Awal Persediaan per 1 Januari 2019 sebesar Rp 1.690.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2020	Tahun 2019
• Alat Tulis Kantor (ATK)	0,00	1.690.600,00

Persediaan bahan pakai habis yang tercatat per 31 Desember 2019 adalah berupa persediaan alat tulis kantor, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
Persediaan Alat Tulis Kantor 2019				**1.690.600,00**
Ballpoint Boxy Unibel	10	Batang	16.900,00	169.000,00
Kertas HVS Folio 70 Gr	25	Rim	52.000,00	1.300.000,00
Kwitansi Kertas NCR Rangkap 6	3	Buah	35.200,00	105.600,00
Paper Clip	4	Kotak	3.500,00	14.000,00
Stopmap Batik	30	Buah	3.400,00	102.000,00

B. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap Per 01 Januari 2020 (*Saldo Awal*) adalah sebesar Rp 5.760.235.570,00. Sampai dengan periode 31 Desember 2020 terjadi mutasi tambah dari belanja modal sebesar Rp 21.612.000,00 yang terdiri dari penambahan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp 21.612.000,00. Selain itu pula terdapat penambahan reklasifikasi aset tetap sebesar Rp 1.000.000,00 dan mutasi tambah antar aset tetap koreksi tahun sebelumnya sebesar Rp 457.982.677,00. Sehingga total mutasi tambah adalah sebesar Rp 480.594.677,00. Penyusutan nilai aset tetap peralatan dan mesin pada 31 Desember 2020 sebesar Rp500.763.827,00 , sehingga diperoleh nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.603.767.621,00**.** Akibat adanya mutasi tambah tersebut, maka diperoleh nilai akhir Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 5.740.066.420,00.**

Perbandingan Rincian Aset Tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Aset	Saldo Awal 01/01/2020	Mutasi			Saldo per 31/12/2020
		Koreksi	Tambah	Kurang	
Tanah	1.404.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.404.000.000,00
Peralatan dan Mesin	2.500.907.013,00	0,00	480.594.677,00	500.763.827,00	2.480.737.863,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, irigasi, Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.855.328.557,00	0,00	0,00	0,00	1.855.328.557,00
Jumlah	**5.760.235.570,00**	**0,00**	**480.594.677,00**	**500.763.827,00**	**5.740.066.420,00**
Akumulasi Penyusutan	(1.358.962.641,00)	0,00	0,00	0,00	(17.381.066.751,00)
Total Nilai Aset Tetap	**5.760.235.570,00**	**0,00**	**480.594.677,00**	**500.763.827,00**	**5.740.066.420,00**

1. Tanah

Nilai Aset berupa Tanah yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah **Rp 1.404.000.000,00.**

Mutasi Perubahan Tanah : NIHIL

Uraian		Jumlah
Saldo Awal per 01Januari 2020 (a)	**Rp**	**1.404.000.000,00**
Penambahan:		
▪ Pembelian	Rp	0,00
▪ Transfer masuk	Rp	0,00
▪ Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp	0,00
▪ Pengembangan	Rp	0,00
▪ Reklasifikasi masuk	Rp	0,00
▪ Pengalihan (masuk)	Rp	0,00
Jumlah (b)	Rp	0,00
Pengurangan		
▪ Transfer keluar	Rp	0,00
▪ Pengalihan (keluar)	Rp	0,00
▪ Reklasifikasi keluar	Rp	0,00
▪ Koreksi Nilai	Rp	0,00
Jumlah (c)	Rp	0,00
Kenaikan/penurunan (b-c)	**Rp**	0,00
Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c)	**Rp**	**1.404.000.000,00**

2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 2.500.907.013,00.**

Uraian		Jumlah
Saldo Awal per 01Januari 2020 (a)	**Rp**	**2.500.907.013,00**
Penambahan:		
▪ Pembelian	Rp	21.612.000,00
▪ Transfer masuk	Rp	0,00
▪ Reklasifikasi masuk	Rp	1.000.000,00
▪ Pengalihan (masuk)	Rp	457.982.677,00
Jumlah (b)	Rp	480.594.677,00
Pengurangan :		
▪ Transfer keluar	Rp	0,00
▪ Pengalihan (keluar)	Rp	0,00
▪ Reklasifikasi keluar	Rp	457.982.677,00
▪ Koreksi Nilai	Rp	0,00
▪ Penghapusan	Rp	0,00
▪ Rusak Berat	Rp	42.781.150,00
Jumlah (c)	Rp	500.763.827,00
Kenaikan /penurunan (b-c)	**Rp**	**(20.169.150,00)**
Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c)	**Rp**	**2.480.737.863,00**

Pada tahun 2020 (s/d periode 31 Desember 2020) terjadi penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :

- Belanja Modal sebesar **Rp 21.612.000,00 y**ang terdiri dari :

PERALATAN DAN MESIN				**936.672.000,00**
PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER				**17.112.000,00**
Printer Epson	4	Unit	4.278.000,00	17.112.000,00
PENGADAAN PERALATAN STUDIO VISUAL				**4.500.000,00**
Camera Digital/Mini	1	Buah	4.500.000,00	4.500.000,00

3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah **Rp 0,00**.

Sedangkan Pada tahun 2019 (s/d periode 31 Desember 2019) nilai gedung dan bangunan adalah Rp 0,00. Pada tahun 2019 terjadi pembelian Aset Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Bangunan Gedung Tempat KerjaGedung Kantor Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah senilai Rp 1.855.328.557,00 dengan rincian sebagai berikut :

GEDUNG DAN BANGUNAN		**1.855.328.557,00**
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN		**1.855.328.557,00**
Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	49.500.000,00	49.500.000,00
Uang Muka Pembangunan Gedung Kantor	518.247.022,00	518.247.022,00
Pembayaran termin I (50%) Pembangunan Gedung Kantor	345.498.015,00	345.498.015,00
Pembayaran Termin II (75%) Pembangunan Gedung Kantor	431.872.520,00	431.872.520,00
Pembayaran Termin III (99,6%) Pembangunan Gedung Kantor)	425.401.000,00	425.401.000,00
Biaya Pengawasan Gedung Kantor	84.810.000,00	84.810.000,00

Aset berupa Gedung dan Bangunan tersebut senilai Rp 1.855.328.557,00 direklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan karena fisik gedung belum selesai atau belum bisa dimanfaatkan sehingga pada tahun 2019 nilainya Rp 0,00.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah **NIHIL.**

5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2019 adalah **NIHIL**.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah **Rp 1.855.328.557,00**.

Uraian		Jumlah
Saldo Awal per 01Januari 2020 (a)	**Rp**	**1.855.328.557,00**
Penambahan:		
▪ Pembelian	Rp	0,00
▪ Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52)	Rp	0,00
▪ Pengembangan	Rp	0,00
▪ Reklasifikasi masuk	Rp	0,00
▪ Pengalihan (masuk)	Rp	0,00
Jumlah (b)	Rp	0,00
Pengurangan :		
▪ Reklasifikasi keluar	Rp	0,00
▪ Koreksi Nilai	Rp	0,00
▪ Penghapusan	Rp	0,00
Jumlah (c)	Rp	0,00
Kenaikan /penurunan (b-c)	**Rp**	**0,00**
Saldo per 31 Desember 2020 (a+(b-c)	**Rp**	**1.855.328.557,00**

7. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.368.239.284,00 dengan uraian sebagai berikut :

Uraian ASET TETAP	Saldo Awal Akum. Peny. Per 1 Jan 2020	Penyesuaian Tambah	Beban Penyusutan Per 31 Desember 2020	Akum. Peny. Per 31 Desember 2020
TANAH				
PERALATAN DAN MESIN			176.309.620	
➢Alat-Alat Angkutan	563.921.809	(2)	-	740.231.431
➢Alat Bengkel/Alat Ukur	-	-	-	-
➢Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
➢Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	742.590.920	314.124.425	60.977.289	489.443.784
➢Alat Studio dan Alat Komunikasi	52.287.412	7.144.800	16.120.515	61.263.127
➢Alat Kedokteran	162.500	-	650.000	812.500
➢Komputer	-	279.438.919	44.950.549	324.389.468
Jumlah	**1.358.962.641**	**41.830.304**	**299.007.973**	**1.616.140.310**

Nilai saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 01 Januari 2020 sebesar **Rp. 1.358.962.641,00** Sedangkan beban penyusutan semester 2 tahun 2020 sebesar **Rp.299.007.973,00** Sehingga diperoleh Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 1.616.140.310,00**

C. Aset Lainnya

1. Aset Lain-lain

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 42.781.150,00** yaitu Aset Rusak Berat/Usang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Uraian/Jenis Barang/Rincian Barang	Vol	Satuan	Biaya Fisik	Biaya Perolehan	Harga Perolehan/Unit	Total Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Keterangan
Papan Pengumuman (Struktur Organisasi)	1	Buah	7.852.800,00	0,00	7.852.800,00	7.852.800,00	2015	Reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Berdasarkan BA Inventarisasi No: 028/003/PBP/DP3APPKB tanggal 27 Maret 2020
Meja Kayu/Rotan	1	Buah	400.500,00	0,00	400.500,00	400.500,00	2011	
Kipas Angin	2	Buah	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2014	
Televisi	1	Buah	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	2015	
Printer	2	Buah	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	2.440.000,00	2014	
Printer A3	1	Buah	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	2015	
Laptop	1	Buah	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2016	
Note Book	1	Buah	8.465.000,00	0,00	8.465.000,00	8.465.000,00	2014	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Buah	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	2009	
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Buah	1.172.850,00	0,00	1.172.850,00	1.172.850,00	2015	

2. Aset Ekstrakomptable

Aset Ekstrakomptable yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi yang diakui sebagai Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 202.800,00-.

Mutasi perubahan Aset Lainnya :

Uraian		Jumlah
Saldo Awal per 01 Januari 2019 (a)	**Rp**	**202.800,00**
Penambahan:		
- Pembelian	Rp	-
- Reklasifikasi masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
- Rusak Berat	Rp	202.800,00
Jumlah (b)	Rp	202.800,00
Pengurangan		
- Transfer keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)		
- Reklasifikasi keluar	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
- Rusak Berat	Rp	202.800,00
Jumlah (c)	Rp	202.800,00
Kenaikan/penurunan (b-c)	**Rp**	0,00
Saldo per 31 Desember 2019 (a+(b-c)	**Rp**	**202.800,00**

4.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban terdiri dari :

A. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 (Per 31 Desember 2019) dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Utang Beban	6.577.287,00	7.660.627,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
4	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	9.524.096.204,00	16.045.847.019,00
	Jumlah	**9.530.673.491,00**	**16.053.507.646,00**

1. Utang Beban

Nilai Utang Beban yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.577.287,00 , terdiri dari -

utang beban tagihan telepon dan listrik untuk penggunaan bulan Desember 2020 dan ditagihkan pada tahun berikutnya. Rincian utang beban pada saldo neraca adalah sebagai berikut:

No	ID Pelanggan	Nama Pelanggan	Total Tagihan
Utang Beban Jasa Listrik (PLN)			
1	224010586721	Dewan Pengurus KOPRI Prov	3.826.871,00
2	224010566135	Aula Kantor Perindustrian	678.956,00
		JUMLAH	**4.508.577,00**
Utang Beban Jasa Telepon (TELKOM)			
1	162401308516	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak	531.000,00
2	161401212781	Dinas P3APPKB Kalteng	531.000,00
3	05363221490	Soedati Warsito Sasman	36.570,00
4	05363224547	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlind	715.070,00
5	05363239008	Badan Pemberdayaan Perempuan Bagian Keua	255.070,00
		JUMLAH	**2.068.710,00**
		TOTAL UTANG BEBAN	**6.577.287,00**

2. Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan s/d periode 31 Desember 2020 adalah Rp 9.524.096.204,00berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020.

B. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai Kewajiban Jangka Panjang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah **NIHIL**.

4.4.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Nilai Ekuitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 dan Tahun 2019 (Per 31 Desember 2019) dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian		Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019
Aset	(a)	4.423.884.929,00	4.402.963.529,00
Kewajiban	(b)	6.577.287,00	7.660.627,00
Ekuitas	**(c = a - b)**	**(4.417.307.642,00)**	**(4.395.302.902,00)**

BAB V
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Pengungkapan Penting Lainnya

Tidak ada

5.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Telah ditindaklanjuti

5.3 Rekening Pemerintah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah hanya mempunyai 1 (satu) Rekening GIRO yaitu pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dengan Nomor Rekening : 100-2-1685-1.

BAB VI
P E N U T U P

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2020

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,

dr. ADM. Tangkudung, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

L A M P I R A N

1. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2020
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) per 31 Desember 2020
3. Setoran Pengembalian Belanja Tahun 2020
4. Berita Acara Pemeriksaan Kas per 31 Desember 2020
5. Surat Pernyataan atas Kepemilikan Rekening
6. Rekening Koran 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020
7. Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi APBD dan Aset Tetap serta Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2020
8. Bukti-bukti Identifkasi Beban-beban akrual s.d. 31 Desember 2020